

Bayang-bayang Politisi-Pebisnis dalam Komposisi Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2024--2029



Divisi Korupsi Politik
Indonesia Corruption Watch
3 Oktober 2024



Urgensi Menelusuri Politisi-Pebisnis

- Intensifikasi tren masuknya pebisnis dalam politik yang belum pernah terjadi sebelumnya (Warburton, 2024).
- Darurat “Regulatory Capture.”
- Cara untuk membaca kepentingan di tengah tidak adanya saluran untuk mengakses gagasan atau politik hukum dibalik legislasi.
- Memantau potensi konflik kepentingan.
- Bagian dari dorongan besar transparansi di urusan publik yang tidak difasilitasi atau bahkan ditutup oleh negara.

Peta Politisi-Pebisnis di Periode Sebelumnya

PERSEBARAN PEBISNIS DI DPR

PERSENTASE

Count of Dapil
1 50
PEBISNIS



NON-PEBISNIS



TOTAL PEBISNIS DPR:

318

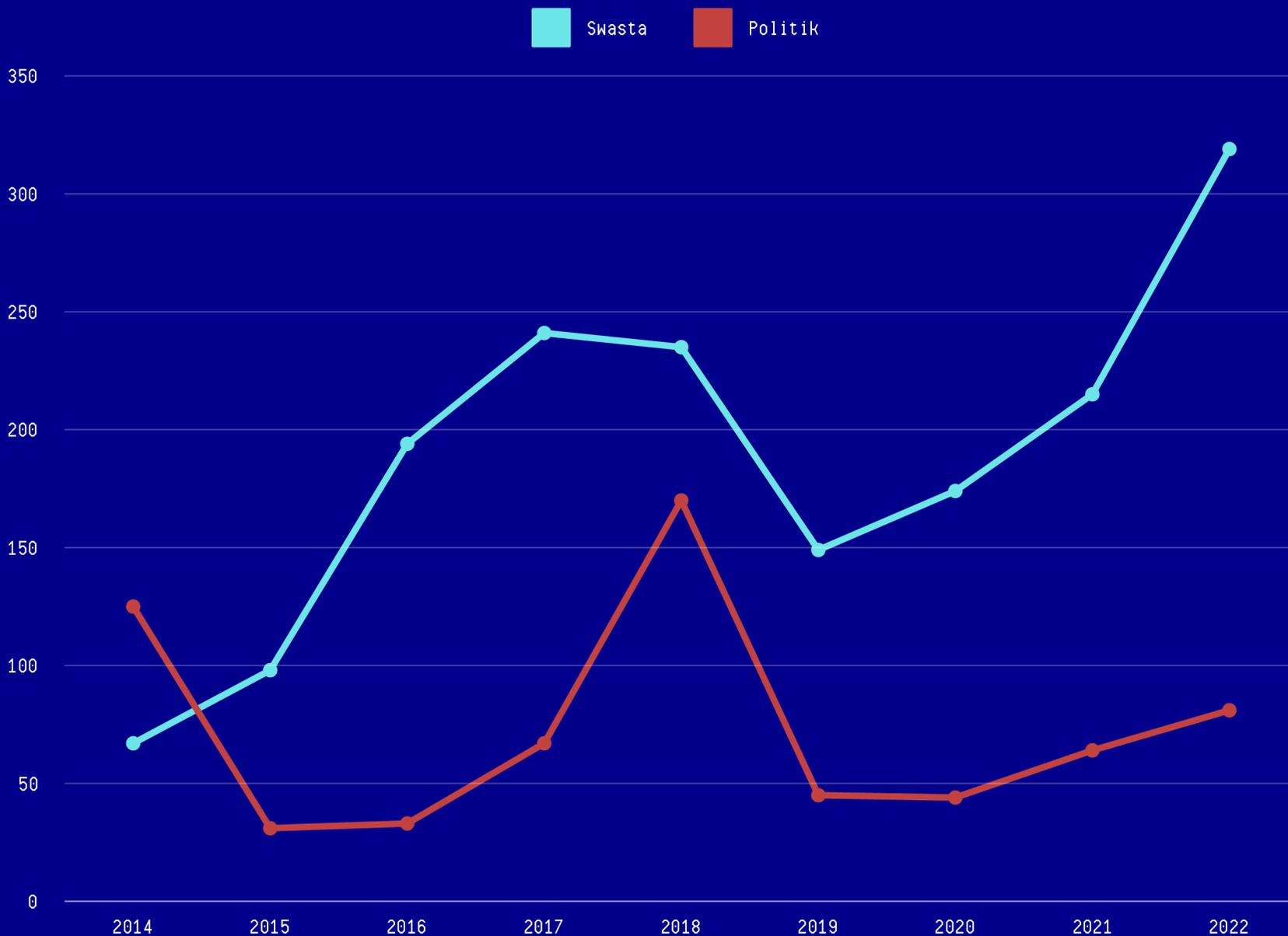
ANGGOTA

5-6 orang dari 10 Anggota DPR ialah Pebisnis



Data dari Tim Peneliti Marepus Corner (2020)

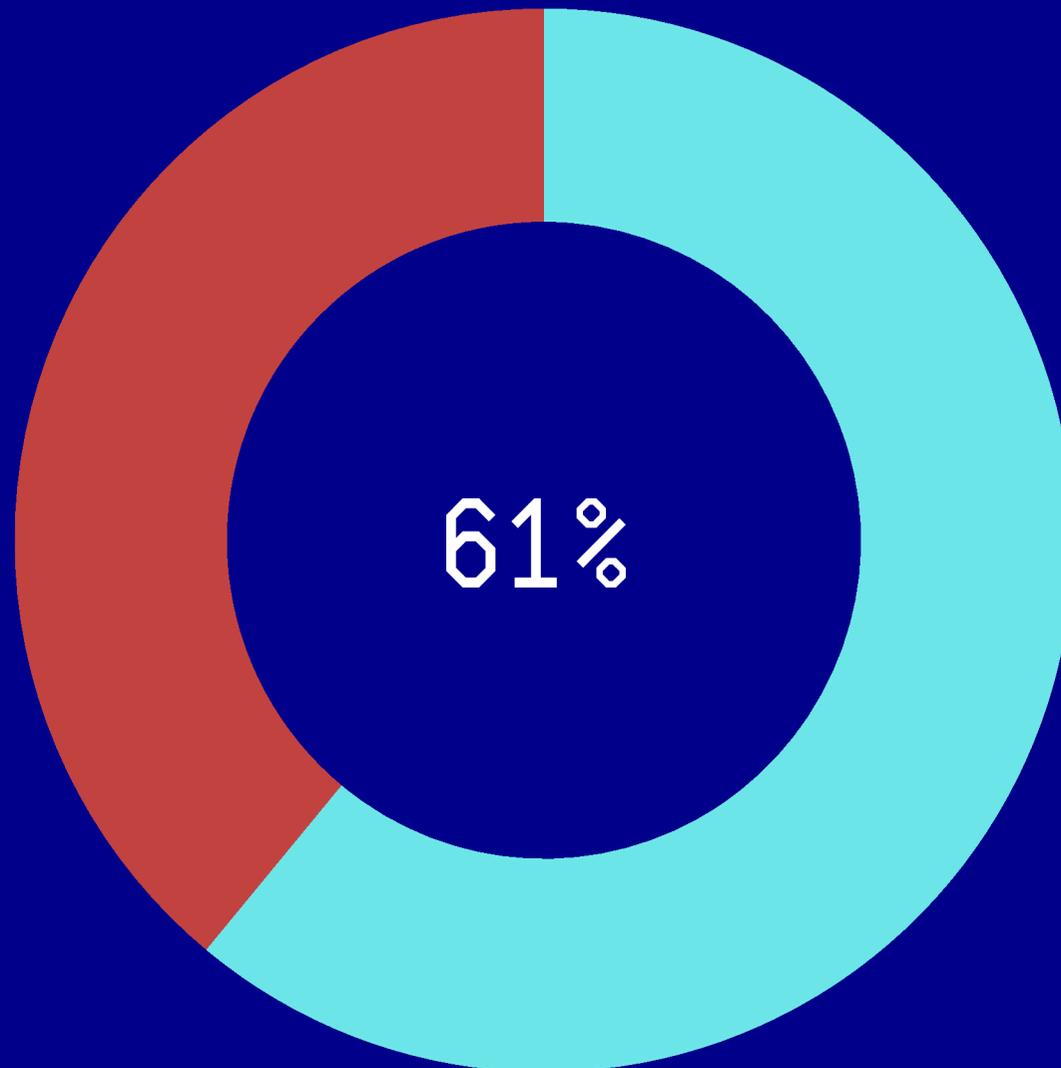
Tren Penindakan Kasus Korupsi (Aktor Swasta & Politik)

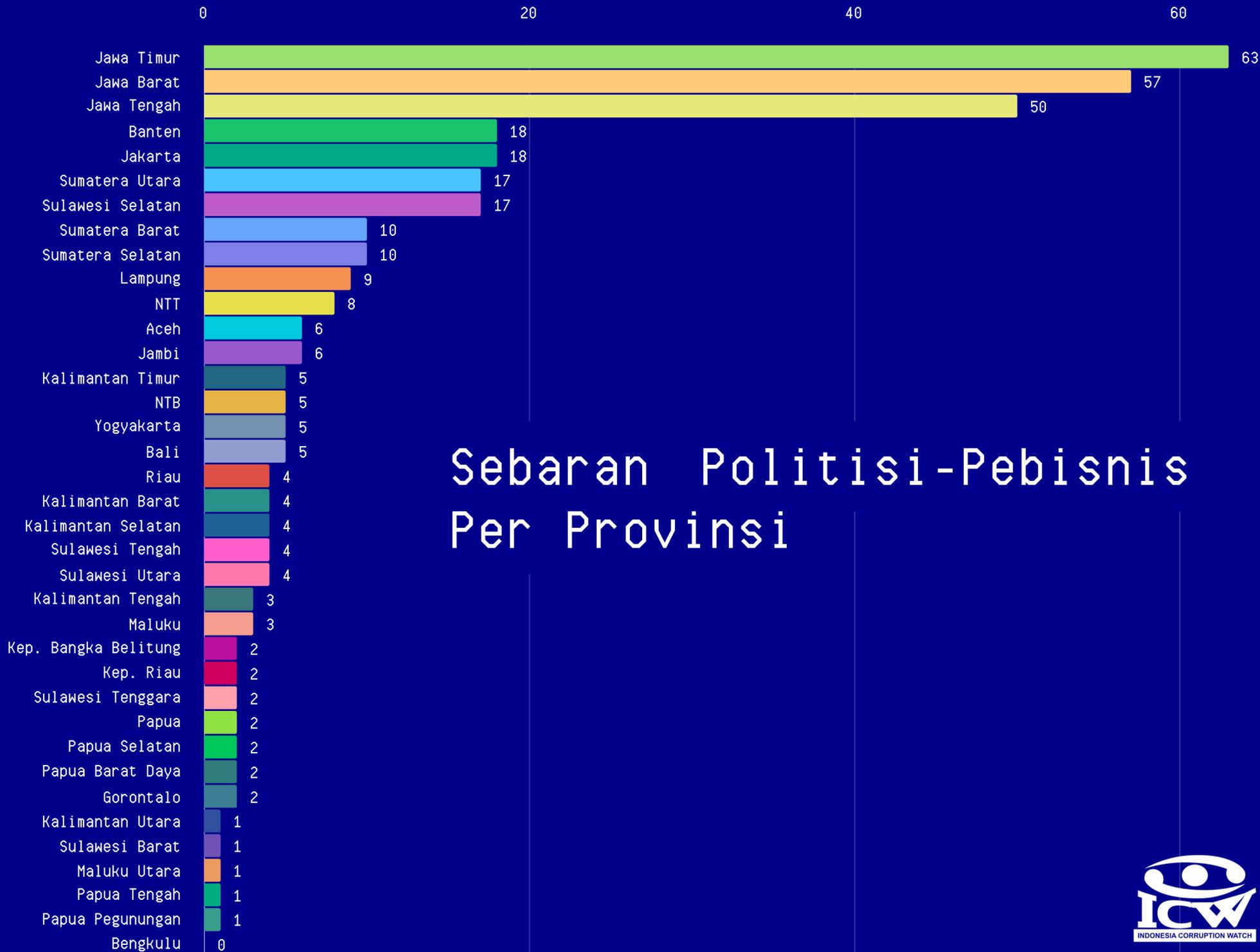


Metode Penelusuran

- Periode Penelusuran = 31 Juli - 22 September 2024.
- Rujukan Daftar Anggota Legislatif = Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 (25 Agustus 2024).
- Sumber data = open-source dan/atau akta perusahaan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham
- Bisnis = seluruh bentuk badan hukum swasta.
- Afiliasi = bisa langsung atau tidak langsung.
 - Direktur;
 - Komisaris;
 - Pendiri;
 - CEO;
 - Posisi Struktural yang Strategis lainnya; dan/atau
 - Pemegang Saham.

Temuan:
354 dari 580 anggota DPR terindikasi
memiliki afiliasi dengan bisnis





Sebaran Politisi-Pebisnis Per Provinsi

Seluruh Partai Pemenang Kursi di Senayan “Menyumbang” Politisi-Pebisnis ke DPR



24 dari total 44 anggota Demokrat di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



60 dari total 102 anggota Golkar di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



29 dari total 48 anggota PAN di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



65 dari total 86 anggota Gerindra di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



41 dari total 69 anggota Nasdem di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



63 dari total 110 anggota PDIP di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



42 dari total 68 anggota PKB di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



30 dari total 53 anggota PKS di DPR terindikasi merupakan politisi-pebisnis



Sebaran Wilayah Daerah Pemilihan Politisi-Pebisnis Per Partai (1)



1 Aceh;
1 Sumatera Utara;
1 Sumatera Barat;
1 Jambi;
1 Sumatera Selatan;
2 Lampung;
4 Jawa Barat;
2 Banten;
3 Jawa Tengah;
4 Jawa Timur;
1 Bali;
1 NTB;
1 NTT;
1 Sulawesi Utara.



1 Aceh;
4 Sumatera Utara;
2 Sumatera Barat;
2 Riau;
1 Kep. Riau;
1 Jambi;
3 Sumatera Selatan;
2 Lampung;
3 Jakarta;
13 Jawa Barat;
3 Banten;
7 Jawa Tengah;
1 Yogyakarta;
12 Jawa Timur;
1 Bali;
1 Kalimantan Barat;
1 Kalimantan Tengah;
1 Kalimantan Timur;
1 Sulawesi Tenggara;
4 Sulawesi Selatan;
1 Maluku.



3 Sumatera Utara;
1 Sumatera Barat;
1 Kep. Riau;
1 Sumatera Selatan;
1 Kepulauan Bangka Belitung;
1 Lampung;
2 Jakarta;
9 Jawa Barat;
4 Banten;
7 Jawa Tengah;
1 Yogyakarta;
7 Jawa Timur;
1 Bali;
1 NTB;
3 NTT;
1 Kalimantan Barat;
1 Kalimantan Tengah;
2 Kalimantan Selatan;
2 Kalimantan Timur;
1 Sulawesi Utara;
1 Gorontalo;
2 Sulawesi Tengah;
1 Sulawesi Tenggara;
3 Sulawesi Selatan;
1 Maluku Utara;
1 Papua Tengah;
1 Papua Barat Daya

Sebaran Wilayah Daerah Pemilihan Politisi-Pebisnis Per Partai (2)



1 Aceh;
1 Sumatera Utara;
2 Sumatera Barat;
1 Jambi;
1 Sumatera Selatan;
1 Lampung;
3 Jakarta;
6 Jawa Barat;
2 Banten;
1 Jawa Tengah;
1 Yogyakarta
3 Jawa Timur;
1 NTB;
1 NTT;
1 Kalimantan Selatan;
1 Sulawesi Tenggara;
2 Sulawesi Selatan.

1 Aceh;
4 Sumatera Utara;
1 Jambi;
1 Sumatera Selatan;
1 Kep. Bangka Belitung;
1 Lampung;
4 Jakarta;
6 Jawa Barat;
2 Banten;
16 Jawa Tengah;
1 Yogyakarta;
16 Jawa Timur;
1 Bali;
1 Kalimantan Bara;
1 Kalimantan Tengah;
1 Kalimantan Utara;
1 Sulawesi Utara;
1 Sulawesi Tengah;
1 Sulawsi Selatan;
1 Maluku;
1 Papua.

1 Aceh;
1 Sumatera Utara;
1 Sumatera Barat;
1 Riau;
1 Jambi;
1 Sumatera Selatan;
1 Lampung;
10 Jawa Barat;
1 Banten;
6 Jawa Tengah;
1 Yogyakarta;
12 Jawa Timur;
2 Nusa Tenggara Timur;
2 Sulawesi Selatan;
1 Papua Selatan.

1 Sumatera Utara;
2 Sumatera Barat;
1 Riau;
1 Lampung;
5 Jakarta;
4 Jawa Barat;
2 Banten;
4 Jawa Tengah;
4 Jawa Timur;
1 NTB;
1 Kalimantan Selatan;
1 Kalimantan Timur;
2 Sulawesi Selatan;
1 Maluku.

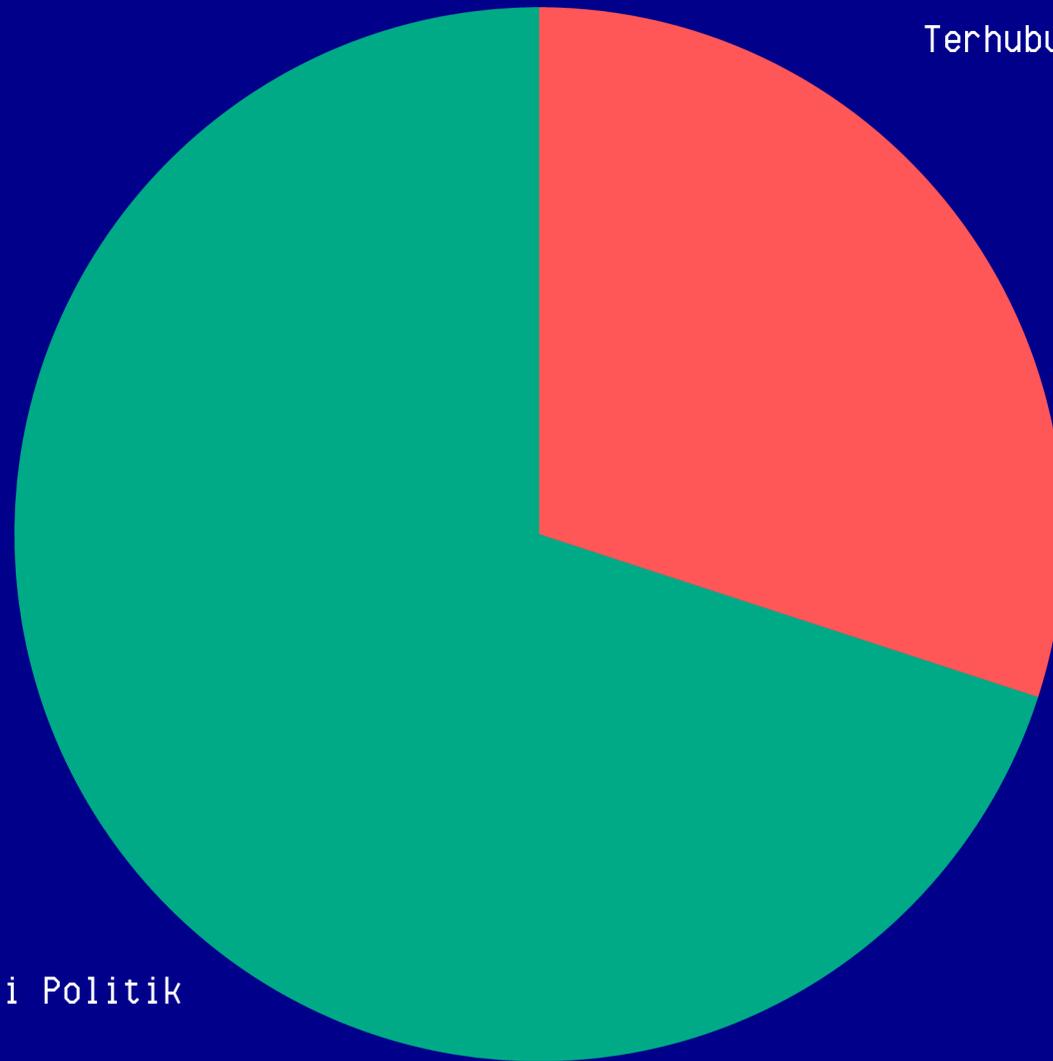
Analisis

- Biaya politik yang “dibuat” mahal dan terus meningkat (baik yang bersumber secara legal maupun ilegal).
 - Demokrasi transaksional.
 - Marak perburuan rente (rent-seeking).
 - Fungsi-fungsi publik (seperti menyusun legislasi) dijadikan sarana akumulasi dan pertahanankan kekayaan
 - Marak kartelisasi politik.
- Tidak ada ruang lagi bagi kepentingan publik.
- Ditutupnya akses informasi yang dapat mengungkap potensi konflik kepentingan akan menyuburkan kolusi dan bahkan memantik korupsi (nihil pengawasan).

Masalah Berulang (yang hampir serupa) Lainnya: Dinasti Politik

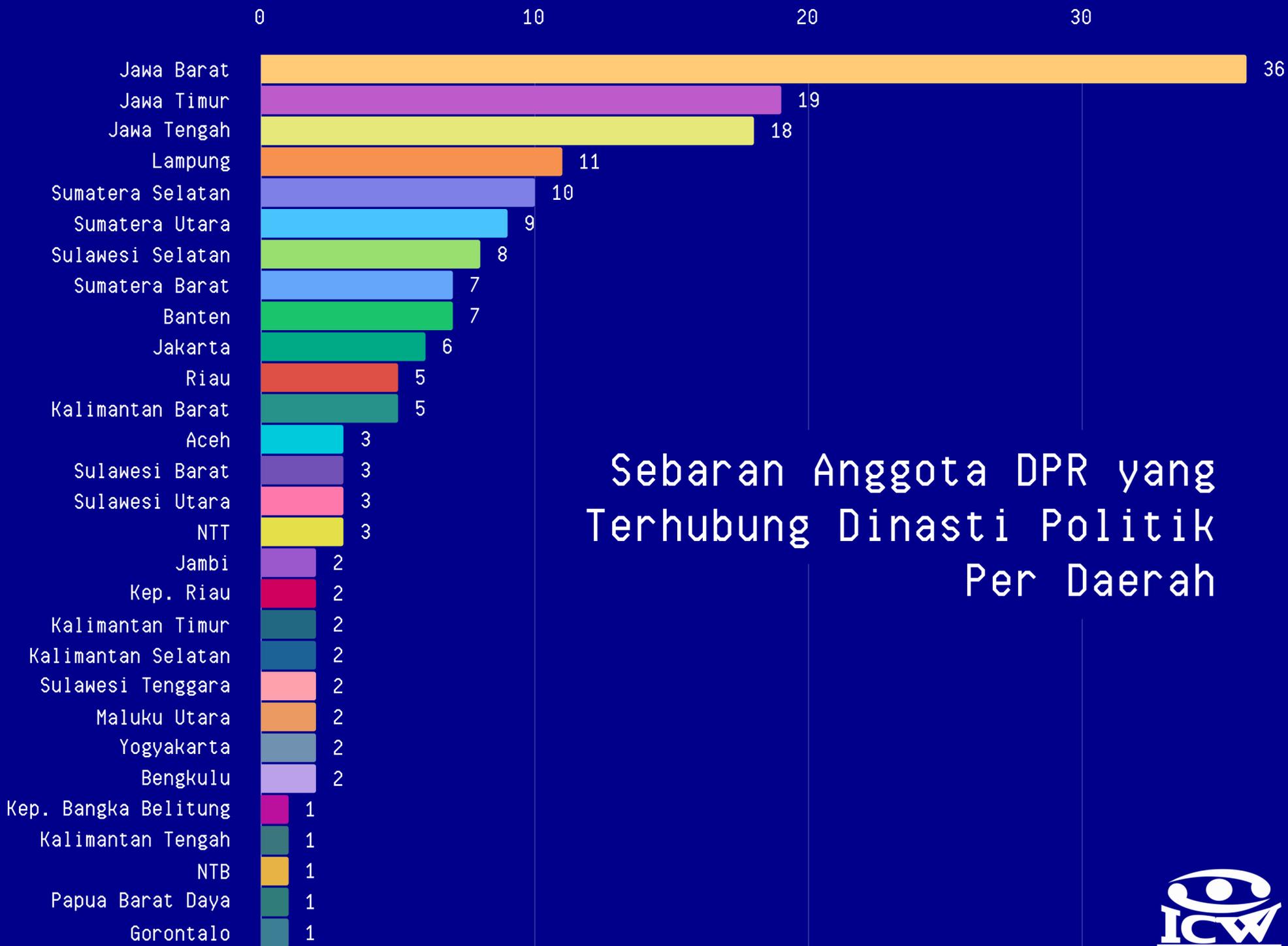
- Dinasti politik = upaya mempertahankan atau mengakumulasi (umumnya dengan mewariskan) kekuasaan di posisi publik bagi kelompok keluarga.
- Logika dasar dinasti politik akan selalu bertentangan dengan semangat demokrasi (perputaran dan pembatasan kekuasaan).
- Korupsi (dalam makna sempit) kerap terjadi seiring dengan keberadaan dinasti politik.
 - Dinasti Banten (korupsi Atut Chosiyah dan adiknya, Chaeri Wardana - 2013);
 - Dinasti Bangkalan (korupsi Fuad Amin Imron - 2014);
 - Dinasti Kutai Kartanegara (korupsi Syaukani Hasan Rais dan anaknya, Rita Widyasari - 2010 & 2017);
 - Dinasti Kutai Timur (korupsi Ismunandar dan istrinya, Encek Unguria - 2020);
 - Dinasti Limpo (korupsi Syahrul Yasin Limpo - 2023)

Sedikitnya 174 dari 580 Anggota DPR
Terindikasi Terhubung dengan Dinasti Politik
(30%)



Terhubung Dinasti Politik
174

Tidak Terhubung Dinasti Politik
406



Sebaran Anggota DPR yang Terhubung Dinasti Politik Per Daerah

Sebaran Anggota DPR yang Terhubung dengan Dinasti Politik Per Partai



16 Anggota



38 Anggota



10 Anggota



28 Anggota



25 Anggota



18 Anggota



17 Anggota



12 Anggota

Ragam bentuk relasi: Eksekutif Pusat, Legislatif Pusat, Mantan Legislatif Pusat, Calon Legislatif Pusat, Kepala Daerah, Mantan Kepala Daerah, Calon Kepala Daerah, Legislatif Daerah, Mantan Legislatif Daerah, Petinggi Partai Politik

Rekomendasi

1. Ada mekanisme manajemen konflik kepentingan melalui Kode Etik DPR atau setidaknya di internal partai politik.
2. Kelembagaan partai politik perlu diperkuat (demokratisasi proses kaderisasi dan independensi pendanaan).
3. Ke depan, skema pendanaan politik (dari sisi payung regulasi) harus direformasi.
4. Mendorong adanya UU atau paket regulasi yang komprehensif guna menangani konflik kepentingan di jabatan publik.
5. Penting bagi masyarakat secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap anggota DPR dan proses pengisian jabatan komisi nantinya (minimal di daerah pemilihan masing-masing).

Image by: @pakindro



PAKINDRO

TERIMA
KASIH